



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A
SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Determinan Politik Luar Negeri Indonesia untuk
Meningkatkan Status Keanggotaan menjadi *Associate*
Member* dalam *Melanesian Spearhead Group (MSG)

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Yosua Giovanni

2017330169

Bandung

2021



Universitas Katholik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A
SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Determinan Politik Luar Negeri Indonesia untuk
Meningkatkan Status Keanggotaan menjadi *Associate*
Member dalam *Melanesian Spearhead Group (MSG)***

Skripsi

Oleh

Yosua Giovanni

2017330169

Pembimbing

Mangadar Situmorang, Ph.D.

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Yosua Giovanni
Nomor Pokok : 2017330169
Judul : Determinan Politik Luar Negeri Indonesia untuk
Meningkatkan Status Keanggotaan menjadi *Associate
Member* dalam *Melanesian Spearhead Group (MSG)*

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 21 Juli 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si.

: 

Sekretaris

Mangadar Situmorang, Ph.D.

: 

Anggota

Vrameswari Omega W., .SIP., M.Si.(Han)

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Yosua Giovanni

NPM : 2017330169

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Determinan Politik Luar Negeri Indonesia untuk Meningkatkan Status Keanggotaan menjadi *Associate Member* dalam *Melanesian Spearhead Group* (MSG)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 12 Juli 2021



Yosua Giovanni

Abstrak

Nama : Yosua Giovanni

NPM : 2017330169

Judul : Determinan Politik Luar Negeri Indonesia untuk Meningkatkan Status Keanggotaan menjadi *Associate Member* dalam *Melanesian Spearhead Group* (MSG)

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan determinan politik luar negeri Indonesia untuk meningkatkan status keanggotaannya dalam organisasi antarnegara Melanesia, *Melanesian Spearhead Group* (MSG) untuk menjadi *associate member* pada tahun 2015. Peningkatan status keanggotaan Indonesia tersebut menimbulkan beberapa perdebatan karena adanya konflik antara Indonesia dengan beberapa negara anggota MSG yang mendukung kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia dan menjadi ancaman terhadap kedaulatan nasional. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan konsep *foreign politics determinant* dari Howard Lentner yang didukung oleh pemikiran dari William D. Coplin untuk dapat menjelaskan faktor-faktor yang terkategori sebagai sebuah determinan dalam politik luar negeri Indonesia. Dengan memfokuskan penelitian terhadap faktor domestik dan faktor internasional yang juga mempengaruhi perumusan politik luar negeri, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat unsur politik yang kuat dalam sikap politik luar negeri Indonesia, akan tetapi terdapat faktor lain yang menjadi pertimbangan pemerintah seperti: pertumbuhan ekonomi dan pengejaran kepentingan nasional lainnya.

Kata Kunci: Determinan politik luar negeri, Indonesia, *Melanesian Spearhead Group*, Kemerdekaan Papua, kedaulatan.

Abstract

Name : Yosua Giovanni
Student Number : 2017330169
Title : Indonesia's Foreign Policy Determinant to Improve the Membership Status to be an Associate Member on the Melanesian Spearhead Group

This research aims to describe Indonesia's foreign policy determinant to improve its membership status on the Melanesian Spearhead Group organization as an associate member on 2015. The improvement of Indonesia's status on the organization raises debates between nations because of the conflict between Indonesia and several members of MSG regarding the independence of Papua issue that become a threat to Indonesia's sovereignty. In conducting the research, the author uses the concept of Foreign Politics Determinant from Howard Lentner which is supported by the similar concept from William D. Coplin to help the author to determine which factor can be categorized as Indonesia's foreign politics determinant. By focusing on domestic and international factors that affect the making of Indonesia's foreign politics, the research has shown that even though there is a strong political factor in the making of Indonesia's foreign policy, yet there is also other factors that came into the government consideration, such as: economic growth and the pursue of national interest.

Key Words: Foreign Politics Determinant, Indonesia, Melanesian Spearhead Group, Independence of Papua, Sovereignty.

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian akhir berjudul “Determinan Politik Luar Negeri Indonesia untuk Meningkatkan Status Keanggotaan Menjadi *Associate Member* dalam *Melanesian Spearhead Group* (MSG)” secara tepat waktu.

Melalui penelitian akhir ini, peneliti berupaya untuk mendeskripsikan berbagai faktor yang mendukung terjadinya peningkatan status keanggotaan Indonesia dalam organisasi antarnegara Melanesia, *Melanesian Spearhead Group* dari *observer member* menjadi *associate member*.

Penulis sadar dalam penulisan ini masih ditemukannya kekurangan ataupun kelemahan. Dengan sebab itu, penulis sangat terbuka terhadap segala saran maupun kritik yang diberikan sehingga dapat menjadikan penelitian yang lebih akurat dan sempurna. Terima Kasih.

Bandung, 12 Juli 2021

Yosua Giovanni

Daftar Isi

Abstrak	i
Abstract	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
1 BAB 1	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.2.1 Deskripsi Masalah	4
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	7
1.2.3 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian	9
1.4 Kajian Literatur	9
1.5 Kerangka Pemikiran	13
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	23
1.6.1 Metode Penelitian	23
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	24
1.7 Sistematika Penulisan	24
2 BAB II	25
2.1 Faktor Nilai Strategis.....	26
2.1.1 Nilai Strategis Indonesia.....	26
2.1.2 Nilai Strategis Pasifik Selatan	28
2.2 Faktor <i>Melanesian Spearhead Group</i>	31
2.2.1 Seputar MSG.....	32
2.2.2 Struktur dan Keanggotaan dalam MSG.....	33
2.2.3 Kegiatan dan Sistem Pengambilan Keputusan dalam MSG	35
2.3 Ancaman Terhadap Kedaulatan Indonesia: Isu Kemerdekaan Papua Barat	37

2.3.1	Memahami Keinginan Papua Untuk Merdeka: Sejarah Bergabungnya Papua ke Indonesia dan Kontroversi Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera)	38
2.3.2	Dasar Permasalahan Integrasi Papua	42
2.3.3	Gerakan Separatisme Papua: Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan <i>United Liberation Movement for West Papua</i> (ULMWP).....	46
2.3.4	Papua pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo	48
2.3.5	Sikap Negara Anggota MSG Terhadap Kemerdekaan Papua..	50
2.4	Faktor Politik Dalam Negeri Indonesia	55
2.4.1	Budaya Politik Luar Negeri Era Presiden Joko Widodo	55
2.4.2	Proses Pengambilan Kebijakan di Indonesia	56
2.4.3	Masa Peralihan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden Joko Widodo	56
2.5	Faktor Idiosinkretis Pengambil Keputusan	58
2.5.1	Joko Widodo	59
2.5.2	Jusuf Kalla.....	61
2.5.3	Retno Marsudi	62
3	BAB 3.....	64
3.1	Determinan Domestik Politik Luar Negeri Indonesia untuk Meningkatkan Status Keanggotaannya dalam MSG.....	65
3.1.1	Highly Stable Determinant.....	65
3.1.2	Moderately Stable Determinant.....	68
3.1.3	<i>Unstable Determinant</i>	72
3.2	Determinan Luar Negeri Politik Luar Negeri Indonesia untuk Meningkatkan Status Keanggotaannya dalam MSG.....	73
3.2.1	Dinamika Kawasan Pasifik Selatan	73
3.2.2	Posisi Negara-Negara di Kawasan Pasifik Selatan Terkait Isu Kemerdekaan Papua.....	75
3.3	Tekanan Domestik Indonesia dan Strategi Negosiasi	77
3.4	Respons Negara-Negara Anggota MSG atas Peningkatan Status Keanggotaan Indonesia menjadi <i>Associate Member</i>	79
4	BAB 4.....	82
	Daftar Pustaka.....	86

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah sistem politik internasional yang bersifat anarki, dimana semua negara memiliki kedudukan yang sama dan tidak ada satu negara/aktor yang memiliki kedudukan lebih tinggi,¹ maka negara sebagai aktor utama hubungan internasional memerlukan sebuah instrumen untuk dapat tetap bertahan. Sikap politik luar negeri dan kebijakan luar negeri yang kuat dari setiap negara akan membantu bagaimana sebuah negara dapat bertahan dalam dunia politik global. Politik luar negeri/politik global/politik internasional merupakan setiap interaksi politik yang dilakukan negara ke luar batas negara dengan aktor hubungan internasional lain, baik itu adalah negara maupun aktor non-negara.² Sedangkan kebijakan luar negeri adalah setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintahan sebuah negara dan memiliki dampak ke luar batasan negara.³ Politik dan kebijakan memiliki hubungan yang erat, karena menurut David Easton, politik adalah sebuah proses dan kebijakan merupakan *output*/hasil dari sebuah proses politik.⁴

¹ Kenneth Waltz, *Theory of International Politics*, (Kanada: Addison Wesley Publishing Company, 1979), 61-62.

² Richard W. Mansbach dan Kirsten L. Rafferty, *Introduction to Global Politics*, (New York: Routledge, 2008), 1.

³ Bojang As, "The Study of Foreign Policy in International Relations," *Journal of Political Sciences & Public Affairs* Vol. 6, Isu 3, (2018): 1-2.

⁴ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), halaman 77-78.

Semua negara pasti memiliki sikap politik luar negeri dan kebijakan luar negeri masing-masing, yang disesuaikan dengan tujuan dan kepentingan negara tersebut. Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat memiliki sikap politik luar negeri dan kebijakan luar negeri yang didasarkan pada pembukaan UUD 1945 alinea pertama: “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.” dan pada tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu untuk “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”⁵ Berdasarkan dua prinsip tersebut, muncul sebuah gagasan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bernama prinsip Bebas Aktif. Kata “bebas” berarti bahwa bangsa Indonesia berhak menentukan sikap sendiri dalam menghadapi tantangan dalam dunia politik internasional tanpa terikat ataupun berpihak kepada salah satu blok yang ada. Sedangkan “aktif” berarti bahwa Indonesia selalu memperjuangkan: kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, yang merupakan tujuan negara.⁶

Meskipun seluruh sikap politik dan kebijakan luar negeri Indonesia didasarkan kepada prinsip Bebas Aktif, akan tetapi penerapan prinsip tersebut berbeda-beda dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang disebut sebagai determinan. Sebagai contoh, pada era pemerintahan presiden Susilo Bambang

⁵ Agus Haryanto, “Prinsip Bebas Aktif dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran,” *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* Vol. 4, Isu 2 (Desember 2014), 17. DOI: 10.34010/JIPSI.V4I02.165

⁶ Loc.cit.

Yudhoyono kebijakan dan sikap politik luar negeri Indonesia cenderung bersifat *high profile*, dimana tujuan utama dari kebijakan yang diambil adalah untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional.⁷ Sedangkan pada era pemerintahan presiden Joko Widodo, kebijakan luar negeri lebih bersifat *low profile*, dimana fokus utama dari kebijakan bukan untuk tampil di panggung internasional akan tetapi untuk membenahi diri kondisi-kondisi yang ada di dalam negeri terlebih dahulu (*inward-looking*).⁸

Pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pendekatan pemerintah Indonesia terhadap MSG memiliki kecenderungan bersifat *containment*, yaitu dengan cara memberikan bantuan-bantuan baik berupa dana, fasilitas, ataupun transfer teknologi terhadap negara-negara anggota MSG. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan presiden SBY yang menyatakan bahwa permasalahan gangguan kedaulatan Indonesia terkait dukungan beberapa elemen terhadap kemerdekaan Papua dapat ditekan dengan menjalin hubungan baik dan persahabatan dengan elemen yang bersangkutan tersebut. Dengan adanya hubungan baik, diharapkan misinformasi seputar permasalahan Papua dapat ditiadakan.⁹

Sedangkan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan Indonesia terhadap MSG cenderung lebih agresif. Salah satunya adalah kebijakan Indonesia

⁷ Mangadar Situmorang, "Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* Vol. 11, Isu 1 (2015), halaman 68. DOI: 10.26593/jihi.v11i1.1442

⁸ *Ibid.* halaman 69.

⁹ Mohamad Hery Saripudin, "Upaya Indonesia dalam Penyelesaian Isu Internasionalisasi Kasus Papua: Diplomasi Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Terhadap Negara-Negara Melanesian Spearhead Group" (Disertasi Sarjana Hubungan Internasional, Universitas Padjajaran, 2016), halaman 8.

untuk meningkatkan status keanggotaannya sebagai *associate member* dari *Melanesian Spearhead Groups* (MSG) pada tahun 2015 silam.¹⁰ Indonesia sebenarnya telah tercatat sebagai *observer member* dari MSG pada tahun 2012, akan tetapi pada pemerintahan Joko Widodo, Indonesia ngotot untuk meningkatkan status keanggotaannya menjadi *associate member*. Secara singkat, MSG merupakan sebuah organisasi antar negara dengan penduduk mayoritas ras Melanesia, yang terletak di kawasan Pasifik Selatan, yang merupakan kawasan tetangga Indonesia.¹¹ Meskipun Indonesia memiliki kedekatan secara geografis dengan kawasan Pasifik Selatan dan negara-negara anggota MSG, akan tetapi hubungan antara kedua pihak tidak selalu baik karena timbul ancaman terhadap persatuan nasional dari beberapa negara di kawasan tersebut.

Hal ini membuat sikap politik luar negeri dan kebijakan Indonesia untuk meingkatkan status keanggotaan dalam MSG sebagai hal yang menarik untuk dibahas. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Determinan Politik Luar Negeri Indonesia: Peningkatan Status Keanggotaan Indonesia Sebagai *Associate Member* dari *Melanesian Spearhead Group* (MSG).”**

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

¹⁰ Muhammad Afif Maulana Roziqi, “Diplomasi *Soft Power* Indonesia dalam Melanesian Spearhead Group terhadap Liberation Movement for West Papua,” *Journal of International Relations* Vol. 6, Isu 2 (2020), 189.

¹¹ Loc.cit.

Indonesia dan negara-negara anggota MSG pada dasarnya memiliki beberapa persamaan dan kedekatan. Selain kedekatan letak secara geografis, Indonesia juga secara fakta merupakan negara dengan jumlah penduduk ras Melanesia terbanyak. Hal ini dikarenakan 5 propinsi di Indonesia, yaitu: Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur, merupakan bagian dari ras Melanesia.¹² Beberapa ahli juga berpendapat bahwa pada dasarnya, Indonesia termasuk ke dalam negara Melanesia, mengingat cukup banyak masyarakat yang tergolong sebagai ras Melanesia.

Terlepas dari kedekatan secara geografis dan ras dari Indonesia dengan MSG di Pasifik Selatan, hubungan politik Indonesia dengan negara-negara di Pasifik Selatan pertama kali terjadi pada tahun 1984. Kontak resmi pertama Indonesia dengan kawasan Pasifik Selatan dilakukan dengan Papua Nugini, yang merupakan negara di perbatasan Timur Indonesia. Alasan dilakukannya kontak dengan Papua Nugini pada saat itu adalah karena kemunculan isu kemerdekaan Papua Barat yang ditandai dengan kemunculan *Free Papua Movement* (FPM), yang menimbulkan konflik antara gerakan separatis, masyarakat sipil, dan anggota militer nasional.¹³ Papua Nugini sendiri menjadi penting bagi pemerintahan Indonesia pada masa itu karena memberikan ruang bagi pengungsi kerusuhan yang terjadi.¹⁴

¹² Tantowi Yahya, "*Pacific Elevation: Diplomasi Indonesia di Pasifik*," dipresentasikan dalam *Re-Orient Webinar Series* ep. 4: Diplomasi Indonesia di Pasifik, 7 Desember 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=m4wPsAtgWow>

¹³ M. Syaprin Zahidi dan Musfiroh, "The Melanesian Spearhead Group in terms of Indonesia's Interest," *Przegląd Politologiczny* No. 2, (2018), 165. DOI: 10.14746/pp.2018.23.2.11

¹⁴ *Ibid.*, halaman 166.

Hubungan politik tersebut terjadi sebelum inisiasi seputar pembentukan MSG muncul. Adanya ide dari negara-negara Pasifik Selatan untuk membentuk organisasi MSG baru muncul pada 1988, dengan munculnya sebuah perjanjian untuk mendukung upaya kemerdekaan Kanak yang juga merupakan negara dengan mayoritas ras Melanesia. Perjanjian tersebut berkembang, dan pada tahun 1996 negara-negara yang terlibat perjanjian kemerdekaan Kanak di Pasifik Selatan menandatangani sebuah perjanjian kerjasama di bidang ekonomi dan promosi kebudayaan Melanesia.¹⁵ Sebelas tahun setelah perjanjian kerjasama tersebut, MSG baru secara resmi berdiri pada tahun 2007 dengan ditandatangani 5 negara serta ditandai dengan terbentuknya sekretariat MSG.¹⁶

Semenjak pembentukan MSG, tidak jarang negara-negara anggota MSG baik secara sendiri maupun dalam forum MSG mengangkat isu kemerdekaan Papua di forum-forum internasional. Vanuatu menjadi salah satu negara yang rajin untuk menyampaikan dukungan terhadap gerakan separatisme Papua beserta negara-negara lain yang secara bergantian menyumbangkan dukungannya. Negara-negara tersebut cenderung memberikan tuntutan untuk keterbukaan pemerintahan Indonesia dengan mempersilahkan badan pengawasan dari PBB untuk turun tangan secara langsung memeriksa kondisi yang ada di Papua. Selain itu anggota MSG juga seringkali meminta dukungan kepada negara yang lebih kuat seperti Australia untuk membantu mengusut kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

¹⁵ *Loc.cit.*

¹⁶ *Loc.cit.*

Meskipun mendapatkan banyak tekanan, pemerintah Indonesia tetap merespon hal tersebut secara positif dengan tujuan untuk tetap menjaga hubungan baik antara kedua pihak. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBPP) Indonesia untuk Selandia Baru dan Kawasan Pasifik, Tantowi Yahya, mengatakan bahwa pendekatan yang efektif untuk dilakukan oleh Indonesia terhadap negara di kawasan Pasifik adalah dengan menggunakan *soft diplomacy*. Hal ini dibuktikan dengan berbagai kebijakan lain yang diarahkan kepada kawasan Pasifik secara umum (bukan hanya Pasifik Selatan/MSG), seperti *Pacific Elevation* yang ditujukan untuk membantu pembangunan di Pasifik dan Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) yang merupakan program bantuan Indonesia untuk negara berkembang lain, dengan mayoritas penerima bantuan adalah negara di kawasan Pasifik Selatan.¹⁷

Upaya *soft diplomacy* yang dilakukan oleh Indonesia tersebut menimbulkan perdebatan karena diragukan keefektifitasannya, mengingat tekanan untuk mendukung kemerdekaan Papua masih diberikan oleh negara-negara anggota MSG terhadap Indonesia. Oleh karena itu, determinan yang ada di balik pengambilan kebijakan Indonesia untuk bergabung sebagai *associate member* MSG menjadi hal yang menarik untuk dikaji.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penulis membatasi waktu penelitian, terutama pada bagian proses pembuatan kebijakan yaitu dimulai dari tahun 2014, dimana presiden Joko Widodo mulai

¹⁷ Adirini Pujayanti, "Kerja Sama Selatan-Selatan dan Manfaatnya Bagi Indonesia," *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, Vol. 6, No. 1 (2015), 74.

menjabat hingga tahun 2015 saat keputusan Indonesia untuk meningkatkan status keanggotaan dalam MSG menjadi *associate member* dibuat. Meskipun demikian, penulis juga memasukan beberapa data yang berasal dari tahun yang lebih lama, yang tidak secara langsung berhubungan dengan proses pembuatan kebijakan, akan tetapi dapat memberikan penulis dan pembaca konteks yang lebih jelas terhadap isu yang dibahas.

Selain waktu, penulis membatasi aktor yang akan dikaji dan membaginya kepada 2 bagian besar, yaitu: aktor domestik (pemerintah Indonesia selaku pembuat kebijakan serta faktor Papua) dan aktor luar negeri (MSG dan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan).

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penulis merumuskan pertanyaan penelitian: **“Bagaimana determinan politik luar negeri Indonesia mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia meningkatkan status keanggotaannya menjadi *associate member* pada *Melanesian Spearhead Group* (MSG)?”**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan determinan politik luar negeri Indonesia yang berujung pada kebijakan luar negeri Indonesia untuk

meningkatkan status keanggotaannya sebagai *associate member* pada *Melanesian Spearhead Group* (MSG).

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah untuk dapat menambah wawasan pembaca mengenai faktor yang mendukung terciptanya kebijakan luar negeri Indonesia meningkatkan status keanggotaannya sebagai *associate member* dari MSG. Selain itu, penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca mengenai kepentingan nasional Indonesia di Kawasan Pasifik Selatan. Penulis juga berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu instrumen bagi pelajar yang akan mengkaji hal serupa di masa mendatang.

1.4 Kajian Literatur

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengkaji beberapa literatur yang digunakan sebagai landasan untuk dapat membantu penulis dalam memahami determinan politik dan kebijakan luar negeri Indonesia untuk meningkatkan status keanggotaannya sebagai *associate member* dari *Melanesian Spearhead Group* (MSG).

Dalam literatur yang berjudul *West Papua, Indonesia, and the Melanesian Spearhead Group: competing logics in regional and international politics* karya Stephanie Lawson menyatakan bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung dengan MSG merupakan keputusan yang rasional karena dapat dijelaskan dengan argumentasi yang jelas. Lawson memandang bahwa bergabungnya Indonesia dengan MSG sekalipun banyak tekanan yang ditujukan kepada Indonesia memiliki

tujuan politis agar Indonesia mampu membatasi hubungan negara-negara MSG dengan *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP). Salah satu hal yang berhasil dilakukan Indonesia adalah dengan menggagalkan upaya dari ULMWP untuk meningkatkan status keanggotannya menjadi *full members* MSG karena Indonesia secara hukum berada di posisi yang sah untuk menciptakan klaim tersebut berdasarkan asas non-intervensi terhadap kedaulatan negara. Selain itu, keberadaan prinsip *The Melanesian Way* yang berasal dari Bernard Narokobi, menjadikan identitas sebagai faktor pengikat yang kuat bagi negara-negara anggota MSG. Hal tersebut juga yang menjadi dasar bagi Narokobi memandang Papua Barat sebagai bagian dari MSG karena secara ras, Papua Barat memang termasuk sebagai ras Melanesia, meskipun secara resmi Papua Barat merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia. Lawson memandang bahwa keberadaan Indonesia di MSG dan berbagai diplomasi yang selama ini bersifat *soft diplomacy* yang dilakukan Indonesia adalah hal yang baik mengingat hal tersebut dapat menaikkan citra positif Indonesia di mata masyarakat Melanesia yang selama ini juga memberikan tekanan untuk Indonesia melalui media sosial.¹⁸

Artikel jurnal dari Stephanie Lawson tersebut dapat membantu penulis dalam memahami lebih lagi faktor MSG yang mempengaruhi kebijakan dan sikap politik luar negeri Indonesia. Meskipun demikian, artikel jurnal tersebut tidak memberikan secara jelas informasi mengenai faktor domestik Indonesia untuk bergabung dengan MSG.

¹⁸ Stephanie Lawson, "West Papua, Indonesia and the Melanesian Spearhead Group: competing logics in regional and international politics," *Australian Journal of International Affairs* (2016), 506-524. DOI: 10.1080/10357718.2015.1119231

Artikel jurnal lain yang menjadi referensi penulis dalam melakukan penelitian terhadap kasus ini adalah “Strategi Pemerintah Indonesia terhadap Negara-negara Anggota *Melanesian Spearhead Group* (MSG) dalam Menghadapi Propaganda Organisasi Papua Merdeka (OPM): Studi Kasus Negara Republik Vanuatu” yang ditulis oleh Tri Legiono Suko, Adnan Majid, dan Gia Noor Syah Putra, yang dipublikasikan dalam Jurnal Peperangan Asimetris pada tahun 2017 silam. Dalam tulisan tersebut, para penulis memandang tujuan dari kebijakan luar negeri Indonesia adalah untuk menciptakan hubungan baik dan meningkatkan citra positif Indonesia di mata negara-negara anggota MSG. Akan tetapi terdapat tiga hambatan utama yang menghambat tercapainya tujuan tersebut, yaitu: kurang munculnya peran *non-state actor* yang bersifat netral dalam pembangunan persepsi di negara-negara anggota MSG, kurangnya komunikasi politik antara pihak Indonesia dengan negara anggota MSG, dan kuatnya doktrin *Melanesian Renaissance* yang mengedepankan politik identitas dengan memanfaatkan adanya perbedaan ras antara masyarakat Papua dengan mayoritas bangsa Indonesia dan persamaan ras antara mayoritas masyarakat Papua dengan mayoritas masyarakat negara anggota MSG.¹⁹

Artikel jurnal tersebut memberikan persepsi baru seputar tujuan kebijakan luar negeri Indonesia untuk bergabung dengan MSG, serta keberadaan hambatan dan tantangan yang menghalangi kepentingan nasional Indonesia terhadap MSG.

¹⁹ Gia Noor Syah Putra, Tri Legionosuko, dan Adnan Majid, “Strategi Pemerintah Indonesia Terhadap Negara-Negara Anggota *Melanesian Spearhead Group* (MSG) dalam Menghadapi Propaganda Organisasi Papua Merdeka (OPM): Studi Kasus Negara Republik Vanuatu,” *Jurnal Peperangan Asimetris* Vol. 5, Isu 2 (2019), 32-44.

Literatur terakhir yang digunakan penulis sebagai referensi terhadap penulisan ini adalah *Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK* yang ditulis oleh Mangadar Situmorang. Beliau beranggapan bahwa kebijakan luar negeri yang diambil pada era pemerintahan Joko Widodo akan cenderung bersifat *inward-looking* dan *low-profile*. Beliau berargumen setidaknya terdapat 4 faktor utama yang mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri secara umum pada masa pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yaitu: (1) prinsip dan tujuan konstitusional dari politik luar negeri Indonesia, (2) konstelasi politik internasional dan regional, (3) dinamika politik dalam negeri, dan (4) idiosinkretisme Joko Widodo sebagai pemimpin negara.

Pertama, prinsip dan tujuan konstitusional politik luar negeri Indonesia akan selalu berlandaskan kepada asas politik luar negeri Bebas Aktif, meskipun penerapan yang dilakukan oleh setiap pemimpin akan selalu berbeda. Hal tersebut dikarenakan prinsip Bebas Aktif memiliki interpretasi yang berbeda bagi setiap pemimpin.²⁰ Kedua, konstelasi politik internasional dan regional yang ada pada era kepemimpinan Joko Widodo tidak bergeser jauh dari masa pemerintahan presiden sebelumnya, sehingga fokus Indonesia akan tetap penguatan nasional.²¹ Faktor ketiga yang mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri Joko Widodo adalah kondisi politik domestik, dimana pasca pemilihan umum tahun 2014, Indonesia terbagi menjadi 2 kubu yang memilih Joko Widodo dan Prabowo Subianto.²² Faktor

²⁰ “Orientasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK,” *Op.Cit.*, halaman 69-71.

²¹ *Ibid.*, halaman 72-73.

²² *Ibid.*, halaman 74-76.

keempat memandang idiosinkretisme Joko Widodo sebagai faktor penting dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia. *Personality trait* dari presiden Joko Widodo dipandang dapat menjadi faktor lain yang menentukan kebijakan luar negeri yang akan diambil selama masa pemerintahannya.²³

Pada artikel jurnal ketiga, faktor pengambil keputusan secara individu dan dinamika politik domestik Indonesia lebih tergambar dengan jelas, meskipun jurnal tidak secara spesifik merujuk kepada kebijakan Indonesia untuk bergabung dengan MSG. Adapun yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh penulis kini dengan penelitian yang telah ada sebelumnya adalah bagaimana penelitian ini secara spesifik mendeskripsikan determinan yang membuat Indonesia bergabung dengan MSG sebagai *associate member*, dengan melihat berbagai faktor baik yang bersifat domestik maupun luar negeri.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam menghadapi sistem internasional yang bersifat anarki dan batasan negara yang semakin bias dalam dunia modern, sikap politik luar negeri dari suatu negara sangat diperlukan sebagai instrumen agar negara tersebut dapat bertahan. Harold Lasswell secara umum mendefinisikan politik sebagai siapa, mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana.²⁴ Lasswell memandang politik sebagai sebuah instrumen negara untuk dapat memenuhi kepentingannya. Sedangkan definisi lain

²³ *Ibid.*, halaman 78-80.

²⁴ Christine Barbour dan Gerald C. Wright, *Keeping the Republic: Power and Citizenship in American Politics the Essentials*, (California: CQ Press, 2017), halaman 4.

yang populer tentang politik adalah politik merupakan sebuah kuasa yang diberikan pada negara untuk mengatur pendistribusian sumber daya yang terbatas kepada masyarakat tanpa menimbulkan kekerasan.²⁵

Politik dan kebijakan merupakan dua hal yang berjalan beriringan dalam kehidupan sebuah negara. David Easton menyatakan bahwa politik adalah sebuah proses, dan kebijakan merupakan *output*/hasil dari proses tersebut.²⁶ David Easton memandang sistem politik sendiri memiliki 2 fungsi utama, yaitu fungsi masukan (*input*) dan fungsi keluaran (*output*).²⁷ Easton mendefinisikan *input* sebagai dukungan serta tuntutan yang berasal dari luar pemerintahan (bisa dari masyarakat, ataupun sistem internasional) yang mendorong pemerintah untuk mengkonversi tuntutan tersebut dalam sebuah *black box* untuk kemudian menjadi *output* dari sistem politik yaitu kebijakan.²⁸ Kebijakan tersebut akan kembali dilemparkan ke masyarakat untuk pada akhirnya menghasilkan *input* baru yang memungkinkan pemerintah kembali membuat kebijakan baru sesuai dengan masukan atau tekanan yang diterima. Hal tersebut menjadi sebuah pola yang menunjukkan sistem bagaimana politik bekerja dalam suatu negara. Berikut adalah bagan yang menggambarkan pemikiran David Easton mengenai sistem politik. Dasar pemikiran Easton tersebut memberikan landasan mengenai bagaimana politik dan kebijakan negara menjadi hal yang berjalan beriringan.

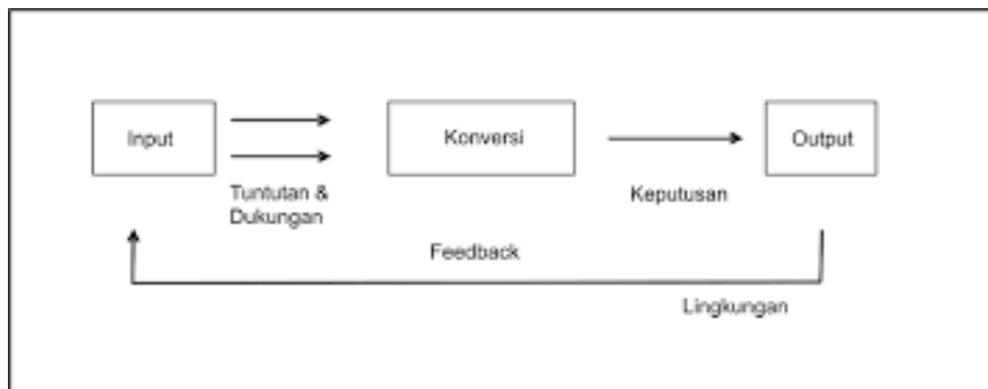
²⁵ *Loc.cit.*

²⁶ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, *Loc.cit.*

²⁷ *Ibid.* halaman 10.

²⁸ *Loc.cit.*

Gambar 1.1 – Proses Politik David Easton



Berdasarkan pengertian politik tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri dan kebijakan luar negeri merupakan dua hal yang berjalan beriringan, akan tetapi memiliki perbedaan. Kebijakan luar negeri sebuah negara pada dasarnya merupakan bagian dari proses politik luar negerinya dan terikat kepada sikap politik luar negeri sebuah negara. Akan tetapi, politik luar negeri sebuah negara tidak ditentukan oleh kebijakan luar negeri yang diambil oleh sebuah negara. Sebagai contoh, kebijakan luar negeri Indonesia pasti dilandaskan kepada prinsip politik luar negeri Bebas Aktif, akan tetapi prinsip Bebas Aktif tidak akan dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri yang diambil oleh setiap presiden.

Politik luar negeri sebuah negara ditentukan oleh faktor yang disebut sebagai determinan. Howard Lentner, dalam bukunya membagi determinan politik luar negeri ke dalam 2 bagian besar: yaitu determinan internasional dan determinan domestik.²⁹ Determinan internasional merujuk kepada sistem dan situasi internasional. Howard Lentner mempercayai sistem internasional sebagai sebuah

²⁹ Mariane Olivia Delanova, "Politik Luar Negeri Indonesia pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo Melalui Penguatan Diplomasi Ekonomi," *Dinamika Global* Vol. 2, Isu 2 (2017), 162. DOI: <https://doi.org/10.36859/jdg.v2i02.40>

pola interaksi antarnegara yang terjadi akibat struktur interaksi di antara pelaku yang paling kuat. Pola hubungan ini membentuk sistem internasional yang bersifat bipolar, multipolar, ataupun unipolar. Sementara itu situasi internasional merujuk kepada interaksi seluruh negara yang terjadi dalam sebuah sistem.³⁰ Contohnya adalah interaksi yang terjadi antara negara-negara ASEAN, dapat dikategorikan sebagai sebuah situasi.

Sementara itu, Lentner membagi determinan domestik ke dalam 3 point, yaitu:

1. *Highly stable determinant*, yang merupakan kondisi domestik yang tergolong sangat stabil dan memiliki kemungkinan kecil untuk berubah.
 - a. Geografis: faktor geografis tergolong sebagai faktor yang sangat stabil karena memiliki kemungkinan sangat kecil untuk berubah. Faktor geografis ini meliputi letak sebuah negara dan bentuk wilayah sebuah negara. Bentuk wilayah dapat berubah apabila bagian dari sebuah negara memisahkan diri, contohnya adalah pemisahan diri Timor-Timor dari Indonesia yang merubah bentuk wilayah.
 - b. Populasi: faktor populasi juga memiliki perubahan yang lambat dan cenderung konstan. Hal ini biasanya dapat dilihat dari piramida kependudukan, yang melihat bagaimana usia penduduk dominan dari sebuah negara yang mempengaruhi kebijakan

³⁰ *Loc.cit.*

negara. Selain itu, jumlah populasi dari sebuah negara juga tidak akan berubah terlalu cepat, kecuali terdapat peristiwa yang memungkinkan menurun ataupun bertambahnya populasi dalam waktu singkat.

- c. Sumber Daya Alam: kondisi sumber daya alam sebuah negara juga memiliki kecenderungan untuk tidak berubah. Sebagai contoh, negara-negara di Timur Tengah yang kaya akan minyak bumi memiliki kebijakan yang konsisten untuk memperkuat perdagangan minyak dengan negara lain yang sudah tercipta sejak lama.

2. *Moderately stable determinant*, yang merupakan kondisi domestik yang tergolong stabil, meskipun memiliki kemungkinan untuk dapat berubah.

- a. Budaya Politik: budaya politik meliputi kebiasaan masyarakat dalam bernegara, hukum dan norma yang berlaku, dan proses administrasi politik. Budaya politik memiliki kemungkinan untuk berubah saat terjadinya pergantian rezim pemerintahan, dan biasanya terjadi secara berproses.
- b. Kepemimpinan: gaya kepemimpinan dan idiosinkretik dari seorang pemimpin dipandang memiliki pengaruh terhadap kebijakan yang diambil. Hal ini dapat dilihat dengan adanya gaya kebijakan yang berbeda dari setiap presiden ataupun kabinet yang berbeda.

3. *Unstable determinant*, yang merupakan kondisi domestik yang sangat mungkin untuk berubah. Contohnya adalah sikap dan persepsi terhadap suatu isu dan faktor-faktor ketidak sengaja yang menuntut diambilnya suatu kebijakan luar negeri.
 - a. Sikap sebuah negara terhadap suatu isu dapat menjadi faktor yang sangat subjektif, yang juga dipengaruhi oleh interpretasi dan gaya kepemimpinan pemimpin negara dan para pengambil keputusan.
 - b. Faktor ketidak sengaja merupakan faktor seperti bencana alam ataupun krisis yang menuntut sebuah negara untuk mengambil sebuah keputusan.³¹

Serupa dengan Howard Lentner, William D. Coplin, dalam bukunya secara spesifik membagi determinan politik luar negeri ke dalam 4 hal, yaitu: (1) konteks internasional, (2) perilaku para pengambil keputusan politik luar negeri, (3) dampak kondisi ekonomi dan militer terhadap suatu negara, dan (4) peran politik dalam negeri dalam perumusan politik luar negeri.³² Coplin mengerucutkan konteks internasional ke dalam tiga elemen penting, yaitu: geografis, ekonomis, dan politis. Geografi dianggap sebagai sebuah faktor yang secara konsisten memainkan elemen penting dalam politik luar negeri, meskipun bukan yang paling penting. Kedekatan geografis antar negara dapat mempengaruhi perilaku negara-negara tersebut dan menciptakan hubungan yang intens antarnegara, seperti dalam konteks perdagangan, pemberian suara dalam berbagai sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa

³¹ *Ibid.*, halaman 163.

³² William D. Coplin, *Pengantar Poliik Internasional Suatu Telaah Teoritis*, diterjemahkan oleh Drs. Marsedes Marbun, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1992), halaman 165.

(PBB), dan kemungkinan negara-negara yang ada memiliki keanggotaan yang sama dalam organisasi regional.³³

Sementara itu hubungan ekonomi antarnegara dipandang sebagai hal penting dalam menentukan sikap pengambilan tindakan politik luar negeri. Hubungan ekonomi yang dimaksudkan Coplin mencakup perputaran arus barang dan jasa. Hubungan ekonomi dinilai dapat menentukan tindakan politik luar negeri suatu negara karena adanya ketergantungan ekonomi (biasanya antara negara berkembang ke negara maju) dan adanya tekanan ekonomi yang dialami oleh negara maju dari negara lain.³⁴ Sedangkan faktor hubungan politik antar negara dapat mendikte sikap politik luar negeri sebuah negara. Keberadaan aliansi bisa memiliki dampak kepada negara-negara yang terlibat untuk memiliki sikap politik yang serupa dengan negara sekutunya, terutama mengenai komitmen negara tersebut dalam sebuah aliansi.³⁵

Determinan kedua yang disebut Coplin adalah faktor pengambil keputusan (*decision maker*). Coplin berpendapat bahwa faktor idiosinkretik dari individu seorang pemimpin dapat memiliki pengaruh kepada kebijakan yang diambil. Meskipun sebuah keputusan dirumuskan oleh banyak orang, akan tetapi Coplin memandang bahwa ada 1 orang dominan yang pada akhirnya menggiring arah keputusan tersebut, dan orang tersebut yang menjadi faktor kuat dalam determinan ini.³⁶

³³ *Ibid.*, halaman 167.

³⁴ *Ibid.*, halaman 167.

³⁵ *Loc.cit.*

³⁶ *Ibid.*, halaman 169.

Determinan ketiga yang disebut Coplin adalah faktor politik dalam negeri. Politik dalam negeri dipandang memiliki pengaruh dan peran dalam keputusan politik luar negeri. Para ahli hubungan internasional membagi politik dalam negeri suatu negara ke dalam 2 segmen, yaitu: jenis pemerintahan negara dan stabilitas politik dalam negeri. Beberapa ahli seperti Thomas Paine, Woodrow Wilson, dan George Kennan membagi negara dalam 2 jenis pemerintahan, yaitu: autokrasi (negara dipimpin oleh 1 orang) dan demokrasi (kekuasaan ada di tangan rakyat). Perbedaan jenis pemerintahan ini dipandang dapat berujung pada perbedaan tujuan politik luar negeri, dimana negara yang memiliki pemerintahan autokrasi memiliki tujuan untuk memperluas kekuasaan mereka, sedangkan negara demokrasi dipandang lebih damai dan memiliki tujuan politik luar negeri untuk saling membantu dan memajukan orang-orang di daerah yang “primitif”.³⁷ Sementara itu stabilitas politik dalam negeri juga dipandang memiliki pengaruh yang besar terhadap politik luar negeri. Negara yang memiliki instabilitas politik dalam negeri cenderung memiliki sikap politik luar negeri yang lebih agresif daripada negara yang memiliki kondisi politik dalam negeri yang stabil.³⁸

Sementara itu determinan terakhir yang disebutkan oleh Coplin adalah kondisi ekonomi dan militer. Gagasan ini didukung oleh argumentasi Lippman yang beranggapan bahwa politik luar negeri sebuah negara harus diimbangi oleh kekuatan dan sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut, dan sumber daya ekonomi dan militer dipandang sebagai hal yang penting dalam menyokong politik

³⁷ *Ibid.*, halaman 170.

³⁸ *Loc.cit.*

luar negeri tersebut.³⁹ Rostow memandang kekuatan ekonomi sebuah negara dapat menentukan agresifitas politik luar negeri. Semakin kuat ekonomi dari sebuah negara, maka semakin memungkinkan negara tersebut untuk bersikap lebih agresif dalam kebijakan luar negerinya. Prinsip serupa juga diterapkan kepada kekuatan militer yang menunjukkan *power* dari sebuah negara untuk dapat bersikap agresif dalam politik luar negerinya.⁴⁰

Selain dua konsep determinan politik luar negeri tersebut, penulis juga akan menggunakan *Two Level Game Theory* dari Robert D. Putnam. Dalam teorinya, Putnam mempercayai bahwa terdapat keterkaitan yang kuat antara politik domestik dan luar negeri sebuah negara. Secara sederhana, *Two Level Game Theory* membagi analisa dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri sebuah negara akan melakukan negosiasi dalam 2 tingkatan, yaitu: domestik dan internasional.⁴¹ Di tingkatan domestik, pemerintah sebuah negara akan menerima tekanan dari kelompok-kelompok pemangku kepentingan nasional untuk menciptakan sebuah kebijakan yang menguntungkan dan para politisi akan mencari koalisi dalam kelompok yang ada. Sedangkan di tingkatan internasional, pemerintah akan memaksimalkan kemampuan untuk memenuhi tekanan domestik tersebut dengan bernegosiasi, sembari mengurangi konsekuensi dari tekanan internasional.⁴² Putnam memandang seluruh negara yang berdaulat dan memiliki hubungan dengan negara lain tidak dapat mengelak dari proses tersebut.

³⁹ *Ibid.*, halaman 172.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 174.

⁴¹ Robert D. Putnam, "Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games," *International Organization*, Vol. 42, Isu 3 (1988), halaman 434.

⁴² *Loc. cit.*

Putnam menyatakan bahwa tokoh politik akan bermain dalam level domestik dan internasional. Di tingkat domestik, beberapa aktor yang disebutkan Putnam adalah: tokoh dan pemimpin politik, perwakilan dari agensi domestik, kelompok pemangku kepentingan, dan penasihat politik dari pemimpin negara. Sedangkan pada level internasional, terdapat dua aktor yang memiliki peran besar, yaitu diplomat/duta besar dan penasihat kebijakan luar negeri.⁴³ Putnam menilai bahwa negara demokrasi memiliki kompleksitas lebih tinggi, dimana negara Demokrasi memiliki lebih banyak pemangku kepentingan yang menyebabkan terjadinya perbedaan pandangan. Hal ini dapat berujung kepada kegagalan pemimpin untuk membawa kepentingan yang jelas pada tingkat internasional, yang juga merusak citra seorang pemimpin pada ranah domestik dan internasional.⁴⁴

Dengan pentingnya keberhasilan negosiasi pada kedua level, maka Putnam mengemukakan bahwa seorang negosiator perlu memahami *Win-Set*, untuk mendapatkan kepentingan di dua ranah dan mengelompokannya ke dalam 3 *Win-Set*. Pertama adalah preferensi atau koalisi, yang merupakan poin kemenangan pada level domestik. Koalisi atau sebuah golongan yang mendukung sebuah kebijakan dapat memiliki pengaruh terhadap hasil dari kebijakan tersebut.⁴⁵

Kedua adalah faktor institusi negara. Faktor ini juga berada pada tingkatan domestik, yaitu mengacu pada birokrasi sebuah negara dalam melakukan ratifikasi terhadap sebuah kebijakan. *Win-set* ini dipandang sebagai sebuah faktor yang kompleks karena setiap negara memiliki proses politik dan birokrasi yang berbeda-

⁴³ *Loc.cit.*

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 445.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 442.

beda dalam meratifikasi sebuah kebijakan.⁴⁶ Sedangkan *Win-Set* ketiga adalah strategi negosiator yang berada di tingkat internasional. *Win-Set* ini melihat bagaimana kemampuan seorang negosiator di tingkat internasional dapat membawa kepentingan domestiknya ke forum internasional.⁴⁷

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teknik metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif berarti penelitian akan dijelaskan secara deskripsi dimana hasil penelitian akan berbentuk analisa. Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti menggunakan teknik studi kasus dan studi pustaka dalam melakukan pengumpulan data. Adapun data yang digunakan oleh penulis dapat berupa gambar, deskripsi, dan angka.⁴⁸ Dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis, maka penulis dapat mendeskripsikan fenomena berdasarkan fakta yang ada untuk selanjutnya dikaji dan pada akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan dari peristiwa tersebut dengan deskripsi.

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 448.

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 450.

⁴⁸ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), halaman 232-236

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, peneliti mengumpulkan sumber2 deskriptif dengan metode studi pustaka, dengan mengumpulkan data dari buku, artikel, artikel jurnal, dokumen resmi negara, dan surat kabar resmi.

1.7 Sistematika Penulisan

Bab 1 berisikan Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

Bab 2 menjelaskan Faktor yang Mempengaruhi Politik Luar Negeri Indonesia di Kawasan Pasifik. Bab ini berisikan data deskriptif mengenai berbagai faktor domestik maupun luar negeri yang mempengaruhi proses perumusan politik luar negeri Indonesia di Kawasan Pasifik. Bab 2 juga menjelaskan *Melanesian Spearhead Group* sebagai sebuah organisasi.

Bab 3 berisikan analisa penulis seputar Determinan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Meningkatkan Status Keanggotaan dalam *Melanesian Spearhead Group* (MSG). Melalui bab ini, penulis akan menganalisa faktor-faktor yang dibahas dalam bab 2 dan melihat apakah faktor tersebut termasuk ke dalam determinan yang memberikan pengaruh terhadap sikap politik luar negeri Indonesia.

Bab 4 berisikan Kesimpulan dari penelitian serta Rekomendasi yang diberikan terhadap fenomena yang dikaji.